



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) KECAMATAN ANGGANA TAHUN 2023

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN ANGGANA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Anggana Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Anggana Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Anggana disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Anggana Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Anggana Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Angganakepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Anggana, 18 Februari 2023

Camat

Rendra Abadi, S.STP.,M.Adm.KP

NIP. 198409222003121001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tupoksi.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Perencanaan Strategis.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Capaian Kinerja.....	22
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	40
BAB IV PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Perbaikan Kedepan.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Anggana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.2. Fungsi Utama

Fungsi dari Perangkat Daerah Kecamatan Anggana yaitu :

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data baserta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau

Kelurahan;

9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan
12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan Kecamatan Anggana dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

- a. Kualitas SDM yang belum memadai;
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Skala Kecil Kecamatan;
- d. Belum optimalnya peran Masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Angganasecara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Permasalahan di Bidang Pemerintahan:

- 1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :
 - a. Bahwa masih banyak warga yang belum melakukan Perekaman KTP-eL;
 - b. Masih banyak warga yang mutasi atau pindah tidak melapor sehingga kevalidan data penduduk sulit di capai.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke Kecamatan, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga

- 2) Pembinaan Perangkat memiliki Permasalahan:
 - a. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Aparatur Kelurahan serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
 - b. Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Kecamatan;
2. Pengalokasian anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
3. Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

B. Permasalahan di Bidang Pertanahan Dan Aset :

- a. Masih Banyak Kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga menimbulkan konflik,
- b. Adanya SKPT ganda,
- c. Masyarakat yang memiliki SKPT tidak berada di wilayah setempat (luar kota) sehingga menyulitkan penyelesaian konflik kepemilikan tanah.

Upaya yang telah dilakukan

Dilakukan inventarisasi penyelesaian kasus tanah secara berjenjang dan bertahap, dan melakukan pengukuran menggunakan GPS untuk mengurangi kesalahan ukuran dan batas-batas kepemilikan tanah.

Melakukan sosialisasi terhadap pemilik tanah yang bukti kepemilikannya hanya SKPT untuk melakukan pendaftaran ulang SKPT/pemutakhiran SKPT dari ukuran manual diganti dengan GPS.

C. Permasalahan di Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan,

- a. Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- b. Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupundari lembaga lain;
- c. Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat Kelurahan maupun kecamatan dengan stake holder atau dinas terkait.

D. Permasalahan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- b. Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- c. Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- d. Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Lurah untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- c. Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- d. Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- e. Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

E. Permasalahan di Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat :

- a. Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah

- tanggung jawab bersama;
- b. Belum ada kepedulian masyarakat terhadapantisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
 - c. Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
 - d. Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi :

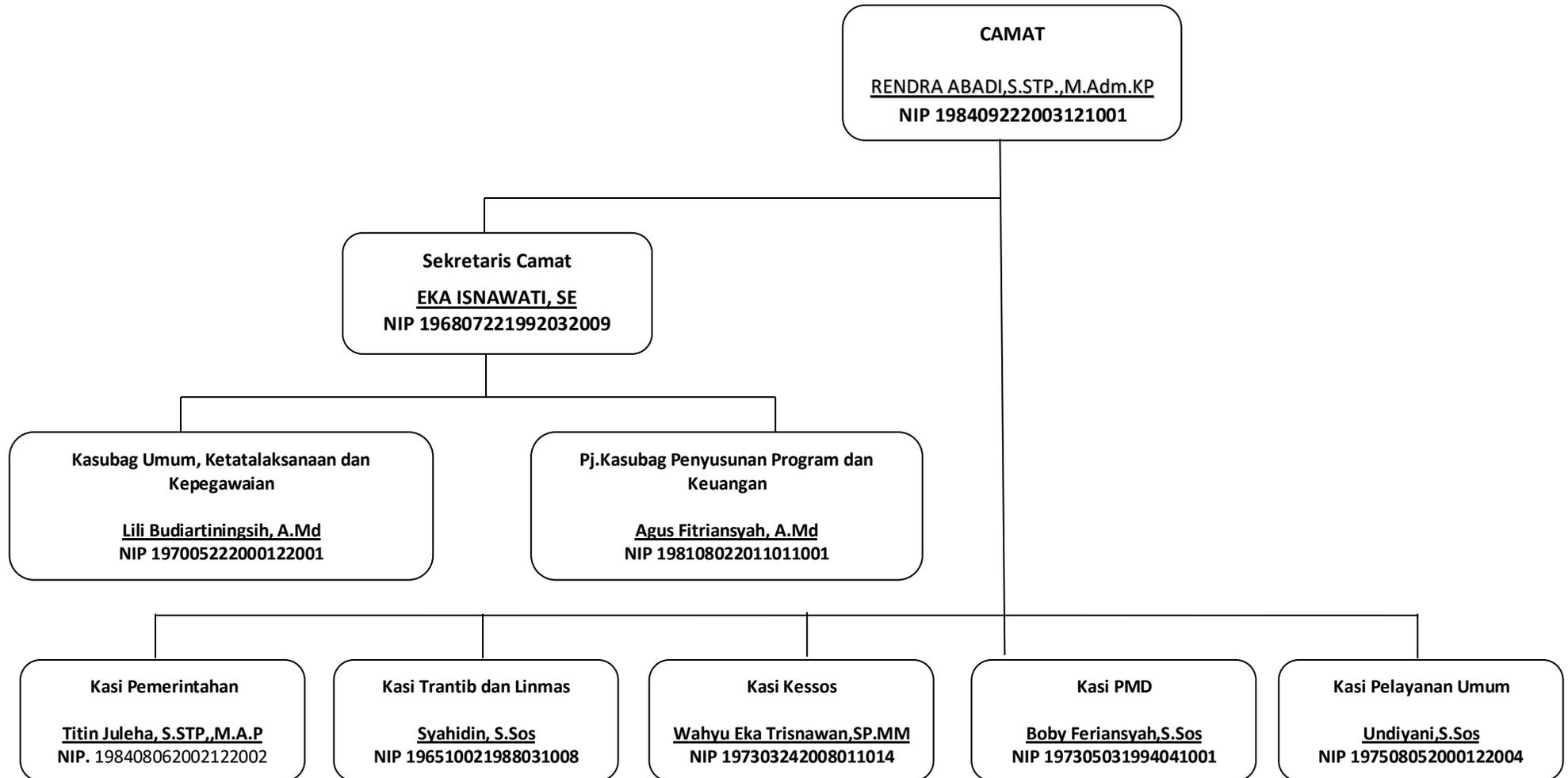
1. Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain;
2. Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmastanggap bencana;
3. Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
4. Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat (Sekcam), beberapa Kepala seksi (Kasi) dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) yang masing-masing membawahi beberapa orang staf. Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Anggana bisa dilihat pada bagan berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT ANGGANA**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Anggana adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Anggana Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi :				
"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi SKPD Kecamatan Anggana untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan SKPD

Kantor Camat Anggana Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Anggana untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kembang Anggana	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anggana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Anggana	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Anggana	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Anggana	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Anggana Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100 %	= 100 / 100*100% = 100%	Belum menerima hasil penilaian Hasil tindak lanjut keluhan atas Pelayanan
		Presentase Capaian Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	70	70	100%	= 70 / 70* 100% = 100%	
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	50	100	100%	= 50/50*100% = 100%	PAD 2023 - PAD 2022 / PAD 2022 = laju pertumbuhan PAD 2023 Rp. 39.678.925 – 19.803.500 /19.803.500 *100% = 100%
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK /Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	0	0	= 100/100*100% = 100%	Tidak ada temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang	Persen	100	100	100	= 100/100*100% = 100%	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
	Pengguna Barang Milik Daerah	berada di Pengguna Barang Milik Daerah						
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100	= 100/100*100% = 100%	
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	= 100/100*100% = 100%	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
	Aparatur Sipil Negara (LHKASN)							
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	= 100/100*100% = 100%	
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Daerah	B (60 -70)	B (60 -70)	65	100	= 100/100*100% = 100%	
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100	= 100/100*100% = 100%	
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	100/100 * 100% = 100 %	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
	penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah							
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	$100/100 * 100\% = 100\%$	
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik Persentase realisasi keuangan	Persen Persen	100 100	100 100	100 100	$100/100 * 100\% = 100\%$	
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100	$100/100 * 100\% = 100\%$	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100		
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	4	100		-
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100		-
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40	0,40	100		-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	16,5	100		-
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	0	0		1.
18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	45	100		
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100	100	100		

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100
		Persentase Capaian Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100	100	100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	70	70	70
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK /Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	50	50	50
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase	100	100	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persentase	100	100	100
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Daerah	B (60 -70)	B (60 -70)	B (60 -70)	B (60 -70)
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik Persentase realisasi keuangan	Persen Persen	100	100	100
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	0	1	0
12	Melaksanakan rewiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	0	1	0

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
	Perangkat daerah sesuai dengan data terkini					
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	0	4	0
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	0	100	0
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0	0,40	0
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	0	16,5	0
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	0	1	0
18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	0	45	0
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Persen	0	100	0
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	0	100	0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Angganadilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Anggana tahun 2023 sebesar 91,07 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100 %	Sangat tinggi
		Persentase Capaian Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	70	100	100%	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	50	100	100%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK /Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	0	0	n.a
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	8	0	0	n.a
		Persentase Ketepatan Waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari kerja	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
		setelah penandatanganan PK Tahun 2023 dan maksimal 14 Hari kerja setelah RAPBD Tahun 2023					
		Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Per tanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKASN Per tanggal 31 Maret 2023	Persen	100	97	97	Tinggi
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Baik(B) 68,36	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan berdasarkan fungsi perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data di aplikasi satu data Kukar	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
4	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumah	1	1	100%	Sangat Tinggi
5	Melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2	2	100%	Sangat Tinggi
6	Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang	Capaian Ouput Kegiatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Daerah	B (60 - 70)	B (60 -70)	65	100	Sangat Tinggi
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	Sangat Tinggi
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik Persentase realisasi keuangan	Persen Persen	100 100	100 100	100 100	Sangat Tinggi
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100	Sangat Tinggi
12	Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	4	100	Sangat Tinggi
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40	0,40	100	Sangat Tinggi
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	16,5	100	Sangat Tinggi
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	0	0	Sangat Tinggi
18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	45	100	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2023 yaitu memperoleh nilai 87 dan realisasinya sebesar 100 atau capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Kecamatan Anggana belum menerima penilaian hasil evaluasi. Sehingga untuk indikator Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2023 yaitu Presentase Capaian Ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 100 % hasil tindak lanjut diatas capaian kinerja yang diperoleh yaitu sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat baik

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja indikator ke-3 tahun 2023 yaitu sebesar 50% dari Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sebesar 100%,. Atas hasil tersebut capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

4) Indikator Kinerja ke-4

Target kinerja indikator ke-4 tahun 2023 yaitu tidak ada Temuan Hasil Pemeriksaan BPK /Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja. Jadi capaian kinerja target indikator ke-4 sebesar 0% dengan capaian kriteria penilaian tidak ada.

5) Indikator Kinerja ke-5

Target kinerja indikator ke-5 tahun 2023 yaitu Pengamanan Bidang Tanah Masih menunggu Hasil Evaluasi Tim Aset BPKAD Kab.Kutai Kartanegara Jadi capaian kinerja target indikator ke-5 sebesar 0% dengan capaian kriteria penilaian blm ada.

6) Indikator Kinerja ke-6

Target kinerja indikator ke-5 tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023), Kecamatan Anggana sudah menginput seluruh pengadaan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Aplikasi SIRUP, sehingga realisasi target yang tercapai yaitu sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

7) Indikator Kinerja ke-7

Target kinerja indikator ke-7 tahun 2023 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 7 pejabat struktural yang wajib lapor semuanya sudah mengisi LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2024. Untuk indikator ke-7 diperoleh realisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

8) Indikator Kinerja ke-8

Target kinerja indikator ke-8 tahun 2023 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 26 ASN yang menjadi target terdapat 1 ASN yang tidak mengisi LHKASN di website <https://siharka.menpan.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2024, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 97% dengan kriteria penilaian tinggi. Hasil yang diperoleh tidak mencapai target dikarenakan ada 1 ASN yang melaporkan atau mengisi LHKASN melebihi dari batas waktu yang sudah ditargetkan. Kedepannya Kecamatan Anggana khususnya di sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan monitoring kepada seluruh ASN agar dapat melaporkan dan menginput LHKASN sebelum dari batas waktu yang menjadi target kinerja penilaian.

9) Indikator Kinerja ke-9

Target kinerja indikator ke-9 pada tahun 2023 yaitu memperoleh predikat/nilai sebesar Baik(B) 60-70. Untuk indikator tata kelola arsip perangkat daerah. Kecamatan Anggana memperoleh predikat/nilai Baik(B) 60 -70 dari hasil audit tim tata kelola arsip perangkat daerah. Berdasarkan hasil tersebut, capaian realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 68,36% dengan kriteria penilaian sangat Tinggi. Kedepannya Kecamatan Anggana akan melengkapi sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip serta berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bagaimana Standar (SOP) dalam pengelolaan arsip dengan baik dan benar.

10) Indikator Kinerja ke-10

Indikator kinerja ke-10 yaitu Persentase ketersediaan data di aplikasi satu data Kukar dengan target sebesar 100%. sebesar 100%. Dari hasil tersebut target indikator ke-10 terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

11)Indikator Kinerja ke-11

Indikator kinerja ke-11 yaitu inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat Daerah dengan target pada tahun 2023 yaitu sebanyak 1 Inovasi. Dari target yang ada tingkat pelaksanaan Inovasi” Pandawa Naga “ Pelayanan Administrasi melalui WA Kecamatan Anggana. sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%

12)Indikator Kinerja ke-12

Indikator kinerja ke-12 yaitu Melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 2 Laporan Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 2 Laporan Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada pada seksi Kesejahteraan sosial Kecamatan Anggana, maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%

13)Indikator Kinerja ke-13

Indikator kinerja ke-13 yaitu Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada CALK Kecamatan Anggana Tahun 2023

14)Indikator Kinerja ke-14

Indikator kinerja ke-14 yaitu Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada CALK Kecamatan Anggana Tahun 2023

15)Indikator Kinerja ke-15

Indikator kinerja ke-15 yaitu Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada CALK Kecamatan Anggana Tahun 2023

16) Indikator Kinerja ke-16

Indikator kinerja ke-16 yaitu Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada CALK Kecamatan Anggana Tahun 2023

17) Indikator Kinerja ke-17

Indikator kinerja ke-17 yaitu Angka Kematian Ibu dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 1. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada di Kecamatan Anggana Tahun 2023

18) Indikator Kinerja ke-18

Indikator kinerja ke-18 yaitu Terealisasinya Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 45%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada di Kecamatan Anggana Tahun 2023

19) Indikator Kinerja ke-19

Indikator kinerja ke-19 yaitu persentase posyandu aktif dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada CALK Kecamatan Anggana Tahun 2023

20) Indikator Kinerja ke-20

Indikator kinerja ke-20 yaitu Terealisasinya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada di Kecamatan Anggana Tahun 2023

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 97%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 95,28%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 2%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Anggana	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	70	70	100 %	70	70	100 %	Tetap
		Presentase Capaian Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	1	1	100%	1	1	200%	Meningkat
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	50	0	0%	50	100	100%	Tetap
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK /Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	1	0	0%	1	0	0%	Tetap
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	6	4	80%	8	0	100%	Tetap
		Persentase Ketepatan Waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari kerja setelah penandatanganan PK Tahun 2023 dan maksimal 14 Hari kerja setelah RAPBD Tahun 2023	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
		Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Per tanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
		Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKASN Per tanggal 31 Maret 2023	Persen	100	79,42	79,42%	100	100	100%	Meningkat
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
		Persentase ketersediaan data di aplikasi satu data Kukar	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
		Jumlah Inovasi	Jumah	0	0	0%	1	1	100%	Tetap
		Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	0	0	0%	2	2	100%	Tetap

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
2		Capaian Ouput Kegiatan	Laporan	0	-	0%	100	100	100%	Tetap
		Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Inovasi	1	1	100	1	1	100%	Tetap
		Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Laporan	1	1	100	1	1	100%	Tetap
		Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Laporan	1	1	100	1	1	100%	Tetap
		Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Dokumen	0	0	0	2	2	100%	Baru
		Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen	0	0	0	1	1	100%	Baru
		Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Kegiatan	0	0	0	4	4	100%	Baru
		Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persen	0	0	0	100	100	100%	Baru
		Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Angka	0	0	0	0,40	0,40	100%	Baru
		Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Persen	0	0	0	16,5	16,5	100%	Baru
		Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka	0	0	0	1	0	100%	Baru

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
		Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	0	0	0	45	45	100%	Baru
		Meningkatnya Posyandu Aktif	Persen	0	0	0	100	100	100%	Baru
		Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Persen	0	0	0	100	100	100%	Baru

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Anggana sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Nilai	80	0	0 %
2	Presentase Capaian Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah	1	1	100%
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	50	100	100%
4	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK /Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Jumlah	1	1	100%
5	Pengamanan Bidang Tanah	Persen	100	100	100%
6	Persentase Ketepatan Waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari kerja setelah penandatanganan PK Tahun 2023 dan maksimal 14 Hari kerja setelah RAPBD Tahun 2023	Persen	100	100	100%
7	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Per tanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%
8	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKASN Per tanggal 31 Maret 2023	Predikat	100	97	100%
9	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	Baik (60-70)	68,36	100%
10	Persentase ketersediaan data di aplikasi satu data Kukar	Persen	100	100	100%
11	Jumlah Inovasi	Persen	100	100	100%
12	Capaian Ouput Kegiatan	Kegiatan	1	1	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Inovasi	1	1	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Laporan	1	1	100
	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Laporan	1	1	100
	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Dokumen	1	1	100
	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen	1	1	100
	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Kegiatan	85	80	94
	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persen	100	100	100
	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Angka	0,40	0,40	100
	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Persen	16,5	16,5	100
	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka	1	1	1
	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	45	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persen	100	100	100
	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Persen	100	100	100

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Anggana tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6 = (3-5)	7
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Anggana	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anggana	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88,88%	0,88%	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Anggana	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	96,64%	0,96%	
Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Anggana	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Anggana	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	96,64%	0,96%	
			Program Fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	93,16%	0,93%	

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari hasil capaian 3 Indikator sasaran strategis terhadap capaian realisasi anggaran 4 program yang ada pada Kecamatan Anggana. Dari 4 program yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat 3 program yang mengalami efisiensi yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar 0,9% , Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar 0,93% dan Program Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa sebesar 0,93%

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2023 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target mendapat nilai 70 dan realisasi target di tahun 2023 tidak mendapat penilaian atau capaian kinerja sebesar 0%. Target kinerja yang sudah ditentukan tidak tercapai, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Kecamatan Anggana belum menerima hasil evaluasi SAKIP. Solusi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Anggana yaitu akan berkoordinasi dan berkonsultasi ke Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai kartanegara tentang tata cara serta kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi agar memenuhi kriteria penilaian SAKIP Kecamatan Anggana.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik tahun 2023 yaitu Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 100%. Ditahun ini target kinerja program tercapai sesuai target, ini dikarenakan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Anggana semuanya sudah sesuai SOP dan standar pelayanan publik. Hasil ini didapat dari hasil survey yang diadakan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan baik itu perijinan atau pun non perijinan. Hasil survey diolah sesuai standar perhitungan Indeks Kepuasan masyarakat dengan memenuhi berbagai kriteria penilaian.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan tahun 2023 yaitu Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif dengan target sebesar 100%. Target kinerja pada tahun ini tercapai dikarenakan seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang ada seperti PKK dan beberapa lembaga lainnya, semuanya aktif dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2023.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisi Keberhasilan /Kegagalan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Anggana	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anggana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	70	70	100%	Target Kinerja tercapai namun belum menerima penilaian atas SAKIP 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Kutai kartanegara
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Anggana	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Target Kinerja tercapai dimana Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan semuanya sudah sesuai SOP

Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Anggana	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Anggana	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100%	Target Kinerja tercapai dimana seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang ada, semuanya aktif dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2023
			100%	100%	100%	Target Kinerja tercapai dimana pada tahun 2023 pada program ini seluruh kegiatan yang ada dapat terlaksana dengan baik

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ada pada Kecamatan Anggana dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 95.82 %, adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240.000.000,00	0,00	20.042.354,00	0,00	20.042.354,00	8,35	219.957.646,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	0,00	9.738.450,00	0,00	9.738.450,00	97,38	261.550,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	0,00	9.803.850,00	0,00	9.803.850,00	98,04	196.150,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00	1.010.000,00	33.720.000,00	0,00	34.730.000,00	46,31	40.270.000,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	335.000.000,00	1.010.000,00	73.304.654,00	0,00	74.314.654,00	22,18	260.685.346,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.919.492.844,00	3.684.722.842,00	0,00	0,00	3.684.722.842,00	94,01	234.770.002,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	0,00	8.525.400,00	0,00	8.525.400,00	85,25	1.474.600,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	77.149.675,00	76.320.000,00	0,00	0,00	76.320.000,00	98,92	829.675,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.006.642.519,00	3.761.042.842,00	8.525.400,00	0,00	3.769.568.242,00	94,08	237.074.277,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	0,00	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	85,60	720.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	33.600.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	38.600.000,00	33.600.000,00	4.280.000,00	0,00	37.880.000,00	98,13	720.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	97.000.000,00	1.360.000,00	93.520.000,00	0,00	94.880.000,00	97,81	2.120.000,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	97.000.000,00	1.360.000,00	93.520.000,00	0,00	94.880.000,00	97,81	2.120.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.563.986,00	1.690.000,00	17.564.635,00	0,00	19.254.635,00	89,29	2.309.351,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.068.000,00	0,00	40.216.000,00	0,00	40.216.000,00	74,38	13.852.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	0,00	4.490.100,00	0,00	4.490.100,00	89,80	509.900,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.986.937,00	1.210.000,00	280.584.736,00	0,00	281.794.736,00	99,58	1.192.201,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000,00	1.690.000,00	1.673.000,00	11.400.000,00	14.763.000,00	98,42	237.000,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	378.618.923,00	4.590.000,00	344.528.471,00	11.400.000,00	360.518.471,00	95,22	18.100.452,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	632.500.000,00	1.410.000,00	0,00	613.680.000,00	615.090.000,00	97,25	17.410.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000,00	1.890.000,00	176.867.100,00	0,00	178.757.100,00	99,31	1.242.900,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	506.574.500,00	3.050.000,00	14.260.000,00	485.710.000,00	503.020.000,00	99,30	3.554.500,00
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.319.074.500,00	6.350.000,00	191.127.100,00	1.099.390.000,00	1.296.867.100,00	98,32	22.207.400,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.387.046,00	1.210.000,00	253.126.884,00	0,00	254.336.884,00	93,37	18.050.162,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.448.597,00	0,00	190.578.322,00	0,00	190.578.322,00	98,52	2.870.275,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	465.835.643,00	1.210.000,00	443.705.206,00	0,00	444.915.206,00	95,51	20.920.437,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.793.900,00	0,00	86.174.610,00	0,00	86.174.610,00	97,05	2.619.290,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	930.000.000,00	3.020.000,00	497.760.330,00	141.738.270,00	642.518.600,00	69,09	287.481.400,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.659.565.485,00	3.812.182.842,00	1.742.925.771,00	1.252.528.270,00	6.807.636.883,00	88,88	851.928.602,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 2.2.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.018.793.900,00	3.020.000,00	583.934.940,00	141.738.270,00	728.693.210,00	71,53	290.100.690,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 2.2.04.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	2.593.059.950,00	3.380.000,00	787.028.633,00	457.265.000,00	1.247.673.633,00	48,12	1.345.386.317,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	64.064.964.100,00	52.200.000,00	62.176.999.299,00	938.331.852,00	63.167.531.151,00	98,60	897.432.949,00

	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.658.024.050,00	55.580.000,00	62.964.027.932,00	1.395.596.852,00	64.415.204.784,00	96,64	2.242.819.266,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 3.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	TOTAL KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	66.658.024.050,00	55.580.000,00	62.964.027.932,00	1.395.596.852,00	64.415.204.784,00	96,64	2.242.819.266,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000,00	1.010.000,00	18.900.000,00	0,00	19.910.000,00	99,55	90.000,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	633.340.000,00	0,00	588.728.890,00	0,00	588.728.890,00	92,96	44.611.110,00
	TOTAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	653.340.000,00	1.010.000,00	607.628.890,00	0,00	608.638.890,00	93,16	44.701.110,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 6.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	653.340.000,00	1.010.000,00	607.628.890,00	0,00	608.638.890,00	93,16	44.701.110,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	73.145.393,00	1.010.000,00	71.377.000,00	0,00	72.387.000,00	98,96	758.393,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.18.0.0 . 6.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	120.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	95,83	5.000.000,00
	Jumlah	75.164.074.928,00	3.869.782.842,00	65.500.959.593,00	2.648.125.122,00	72.018.867.557,00	95,82	3.145.207.371,00

Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Anggana sebesar 97%, adapun realisasi anggaran dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran sebelumnya (Tahun 2022)

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Realisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	76.866.991,00	96,08
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.298.500,00	92,99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	8.633.250,00	86,33
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	9.902.000,00	99,02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	49.033.241,00	98,07
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.337.888.469,00	3.819.544.173,00	88,05
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.251.568.469,00	3.734.297.173,00	87,83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	8.927.000,00	89,27
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	76.320.000,00	76.320.000,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.600.000,00	38.280.000,00	93,60
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	4.680.000,00	93,60
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.548.923,00	321.814.694,00	97,65
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.613.986,00	22.068.000,00	93,45
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.098.000,00	54.538.000,00	98,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	1.031.400,00	20,63

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.826.937,00	229.338.994,00	99,79
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.010.000,00	14.838.300,00	92,68
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	343.350.000,00	330.922.185,00	96,38
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	206.440.000,00	200.808.185,00	97,27
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.910.000,00	130.114.000,00	95,04
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.289.980,00	377.673.312,00	88,39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.746.966,00	188.898.782,00	80,13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.543.014,00	188.774.530,00	98,55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.852.000,00	346.052.269,00	96,97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.210.000,00	26.773.269,00	85,78
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	325.642.000,00	319.279.000,00	98,05
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.415.948.000,00	20.291.569.169,00	99,39
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20.415.948.000,00	20.291.569.169,00	99,39
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	226.860.000,00	215.009.150,00	94,78
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.010.000,00	21.009.650,00	100,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	205.850.000,00	193.999.500,00	94,24
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	225.365.393,00	157.828.500,00	70,03
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	74.155.393,00	68.118.500,00	91,86
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	151.210.000,00	89.710.000,00	59,33
	26.781.702.765,00	25.975.560.443,00	97,0

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Anggana Tahun 2023 rata-rata sebesar 95,82 % (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2023 yaitu memperoleh nilai 87 dan realisasinya sebesar 100 atau capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Kecamatan Anggana belum menerima penilaian hasil evaluasi. Sehingga untuk indikator Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2023 yaitu Presentase Capaian Ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 100 % hasil tindak lanjut diatas capaian kinerja yang diperoleh yaitu sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat baik

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja indikator ke-3 tahun 2023 yaitu sebesar 50% dari Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sebesar 100%,. Atas hasil tersebut capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

4) Indikator Kinerja ke-4

Target kinerja indikator ke-4 tahun 2023 yaitu tidak ada Temuan Hasil Pemeriksaan BPK /Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja. Jadi capaian kinerja target indikator ke-4 sebesar 0% dengan capaian kriteria penilaian tidak ada.

5) Indikator Kinerja ke-5

Target kinerja indikator ke-5 tahun 2023 yaitu Pengamanan Bidang Tanah Masih menunggu Hasil Evaluasi Tim Aset BPKAD Kab.Kutai Kartanegara Jadi capaian kinerja target indikator ke-5 sebesar 0% dengan capaian kriteria penilaian blm ada.

6) Indikator Kinerja ke-6

Target kinerja indikator ke-5 tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023), Kecamatan Anggana sudah menginput seluruh pengadaan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Aplikasi SIRUP, sehingga realisasi target yang tercapai yaitu sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

7) Indikator Kinerja ke-7

Target kinerja indikator ke-7 tahun 2023 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 7 pejabat struktural yang wajib lapor semuanya sudah mengisi LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2024. Untuk indikator ke-7 diperoleh realisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

8) Indikator Kinerja ke-8

Target kinerja indikator ke-8 tahun 2023 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 26 ASN yang menjadi target terdapat 1 ASN yang tidak mengisi LHKASN di website <https://siharka.menpan.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2024, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 97% dengan kriteria penilaian tinggi. Hasil yang diperoleh tidak mencapai target dikarenakan ada 1 ASN yang melaporkan atau mengisi LHKASN melebihi dari batas waktu yang sudah ditargetkan. Kedepannya Kecamatan Anggana khususnya di sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan monitoring kepada seluruh ASN agar dapat melaporkan dan menginput LHKASN sebelum dari batas waktu yang menjadi target kinerja penilaian.

9) Indikator Kinerja ke-9

Target kinerja indikator ke-9 pada tahun 2023 yaitu memperoleh predikat/nilai sebesar Baik(B) 60-70. Untuk indikator tata kelola arsip perangkat daerah. Kecamatan Anggana memperoleh predikat/nilai Baik(B) 60 -70 dari hasil audit tim tata kelola arsip perangkat daerah. Berdasarkan hasil tersebut, capaian realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 68,36% dengan kriteria penilaian sangat Tinggi. Kedepannya Kecamatan Anggana akan melengkapi sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip serta berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan bagaimana Standar (SOP) dalam pengelolaan arsip dengan baik dan benar.

10) Indikator Kinerja ke-10

Indikator kinerja ke-10 yaitu Persentase ketersediaan data di aplikasi satu data KUKAR dengan target sebesar 100%. sebesar 100%. Dari hasil tersebut target indikator ke-10 terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

11) Indikator Kinerja ke-11

Indikator kinerja ke-11 yaitu inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat Daerah dengan target pada tahun 2023 yaitu sebanyak 1 Inovasi. Dari target yang ada tingkat pelaksanaan Inovasi” Pandawa Naga “ Pelayanan Administrasi melalui WA Kecamatan Anggana. sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%

12) Indikator Kinerja ke-12

Indikator kinerja ke-12 yaitu Melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 2 Laporan Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 2 Laporan Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada pada seksi Kesejahteraan sosial Kecamatan Anggana, maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%

13) Indikator Kinerja ke-13

Indikator kinerja ke-13 yaitu Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada CALK Kecamatan Anggana Tahun 2023

14) Indikator Kinerja ke-14

Indikator kinerja ke-14 yaitu Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada CALK Kecamatan Anggana Tahun 2023

15) Indikator Kinerja ke-15

Indikator kinerja ke-15 yaitu Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada CALK Kecamatan Anggana Tahun 2023

16) Indikator Kinerja ke-16

Indikator kinerja ke-16 yaitu Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada CALK Kecamatan Anggana Tahun 2023

17) Indikator Kinerja ke-17

Indikator kinerja ke-17 yaitu Angka Kematian Ibu dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 1 Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada di Kecamatan Anggana Tahun 2023

18) Indikator Kinerja ke-18

Indikator kinerja ke-18 yaitu Terealisasinya Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 45%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada di Kecamatan Anggana Tahun 2023

19) Indikator Kinerja ke-19

Indikator kinerja ke-19 yaitu persentase posyandu aktif dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada CALK Kecamatan Anggana Tahun 2023

20) Indikator Kinerja ke-20

Indikator kinerja ke-20 yaitu Terealisasinya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Anggana sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada di Kecamatan Anggana Tahun 2023

Capaian kinerja tahun 2023 menurun dari tahun sebelumnya karena ada efisiensi anggaran, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja Kecamatan Anggana sebesar 97%.

4.2 Perbaikan Kedepan

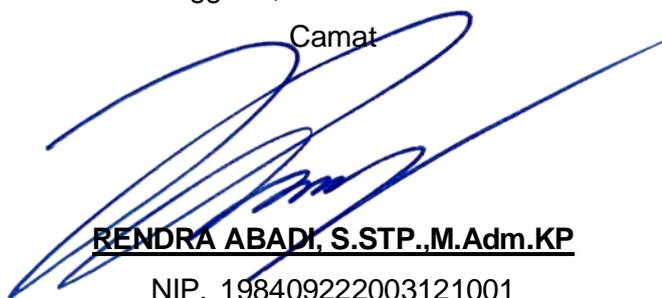
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Anggana akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pemenuhan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam penilaian SAKIP,
- 2) Terkait predikat pengelolaan arsip perangkat daerah Kecamatan Anggana telah memenuhi target maka akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terkait tata cara pengelolaan arsip dengan baik dan benar. Dimana selama ini Kecamatan Anggana ada beberapa kendala dalam pengelolaan arsip perangkat daerah. Hambatan yang dialami oleh Kecamatan Anggana dalam mengelola arsip yaitu karena kurangnya sumber daya manusia, tidak ada arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, belum adanya pelatihan tentang kearsipan yang diberikan kepada aparatur kecamatan, serta perlunya sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip.
- 3) Akan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap ASN yang belum melaporkan harta kekayaan di aplikasi LHKASN sebelum batas waktu yang ditentukan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Anggana Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Anggana, 18 Februari 2023

Camat



RENDRA ABADI, S.STP.,M.Adm.KP
NIP. 198409222003121001

